



Digitalisasi Tata Kelola SDM Aparatur di Indonesia

Nur Adila¹, Lolita Deby Mahendra Putri²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak: Digitalisasi tata kelola sumber daya manusia (SDM) dalam pemerintahan Indonesia adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi dapat memperkuat perencanaan dan pengembangan SDM aparatur di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan studi literatur, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen publik. Data dianalisis melalui teknik analisis data interaktif, meliputi pengumpulan, reduksi, dan penyajian data. Temuan utama menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi digital di antara SDM aparatur sangat penting untuk meningkatkan efektivitas layanan publik. Penerapan teknologi dalam birokrasi memungkinkan layanan yang lebih cepat dan akurat, terutama di sektor administrasi kependudukan dan kesehatan. Program pelatihan digital dan penggunaan aplikasi untuk pemantauan kinerja dapat mendorong birokrasi yang lebih efisien dan profesional. Kesimpulannya, digitalisasi SDM aparatur sangat diperlukan untuk mencapai pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta program pelatihan berbasis teknologi digital perlu didorong untuk memastikan ASN memiliki keterampilan teknis dan etika dalam penggunaan teknologi yang memadai.

Kata Kunci: Digitalisasi, SDM Aparatur, Transformasi Teknologi

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2125>

*Correspondence: Nur Adila

Email:

2010631180096@student.unsika.ac.id

Received: 03-10-2024

Accepted: 11-11-2024

Published: 23-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Digitalization of human resource (HR) governance in the Indonesian government is an important step to improve the efficiency and quality of public services. This research aims to analyze how technology can strengthen the planning and development of HR apparatus under the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This research uses descriptive qualitative research methods and literature studies, this research collects data from various sources such as books, journals, and public documents. Data were analyzed through interactive data analysis techniques, including data collection, reduction, and presentation. The main findings show that the development of digital competencies among the human resources of the apparatus is essential to improve the effectiveness of public services. The application of technology in the bureaucracy enables faster and more accurate services, especially in the civil registration and health administration sectors. Digital training programs and the use of applications for performance monitoring can encourage a more efficient and professional bureaucracy. In conclusion, the digitalization of human resources is necessary to achieve more responsive, transparent and accountable public services and digital technology-based training programs need to be encouraged to ensure that civil servants have adequate technical skills and ethics in the use of technology.

Keywords: Digitalization, HR Apparatus, Technology Transformation

Pendahuluan

Digitalisasi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di Indonesia telah menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan modernisasi birokrasi dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Dalam konteks ini, teknologi digital berperan sebagai katalisator dalam mengoptimalkan proses perencanaan, pengelolaan, dan

pengembangan SDM aparatur. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong terciptanya sistem tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel (Rosari et al., 2022).

Pentingnya digitalisasi tata kelola SDM aparatur tidak terlepas dari kebutuhan untuk membangun kompetensi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mendukung implementasi e-government serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan SDM dapat mengurangi tingkat birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan (Maslikhah, 2023). Dalam implementasinya, digitalisasi SDM aparatur di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya infrastruktur digital hingga minimnya literasi teknologi di kalangan aparatur. Oleh karena itu, penguatan kompetensi digital melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi prioritas utama untuk memastikan keberhasilan transformasi ini (Firdaus et al., 2021). Hal ini juga relevan dengan kebutuhan meningkatkan kapasitas SDM untuk menghadapi era Society 5.0, di mana teknologi menjadi elemen utama dalam semua aspek kehidupan (Amalia et al., 2024).

Transformasi teknologi dalam tata kelola SDM aparatur memberikan peluang besar bagi organisasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan penerapan sistem digital, pengelolaan arsip dan dokumen pegawai dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, digitalisasi arsip online telah berhasil meningkatkan efisiensi tata naskah di berbagai instansi pemerintah (Saggaf, 2020). Inisiatif ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga strategi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Selain itu, keberhasilan digitalisasi tata kelola SDM aparatur sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Studi literatur mengungkapkan bahwa implementasi e-government di tingkat desa telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Irawaty et al., 2023). Dengan demikian, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa transformasi ini dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi digitalisasi, pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi telah menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan efisiensi kerja ASN. Aplikasi ini memungkinkan pengawasan kinerja pegawai secara real-time, sehingga mendukung terciptanya sistem penilaian yang lebih objektif dan transparan (Rizal et al., 2022). Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan terjadinya integrasi data yang lebih baik antarinstansi pemerintah (Rohmadi & Idrus, 2023). Namun, penerapan teknologi digital juga membutuhkan perubahan budaya organisasi di lingkungan ASN. Transformasi ini tidak hanya terkait dengan adopsi teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya

kerja yang mendukung inovasi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat meningkatkan kinerja ASN secara signifikan jika diiringi dengan pelatihan yang tepat (Junianto & Busiri, 2023). Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan.

Dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat, digitalisasi tata kelola SDM aparatur di Indonesia menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendampingan dan implementasi teknologi di tingkat desa mampu meningkatkan kualitas SDM secara signifikan (Langga & Hyron, 2024). Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi digitalisasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan (Anwar & Rohman, 2020).

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, serta proses yang berlangsung dalam konteks penguatan teknologi SDM Aparatur dan reformasi birokrasi menuju era digital (Soendari, 2012). Penelitian deskriptif kualitatif ini menginterpretasikan data untuk memahami fenomena secara lebih mendalam dan holistik (Roosinda et al., 2021). Dalam hal ini, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis situasi dan tantangan yang dihadapi SDM Aparatur dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjelaskan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi era digitalisasi dan Society 5.0. Penelitian ini bersumber pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal ilmiah, pendapat pakar, dan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan kajian literatur atau library research memungkinkan pengumpulan informasi yang komprehensif dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, berita daring, dan dokumen resmi lainnya (Yuliani, 2018). Teknik analisis yang digunakan adalah interaktif, melibatkan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang cara optimalisasi teknologi digital dalam tata kelola SDM Aparatur guna mendukung transformasi birokrasi di Indonesia.

Dalam proses analisis hasil penelitian, penulis mengadopsi pendekatan metode analisis deskriptif. Selain itu, penulis juga menerapkan metode studi literatur yang melibatkan beberapa tahapan, antara lain: pencarian kata kunci yang relevan, identifikasi subjek, eksplorasi berbagai artikel, peninjauan jurnal-jurnal ilmiah, serta pengumpulan kutipan dari beragam sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik Analisis

Data Interaktif, yang meliputi tiga tahap utama: 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, dan 3. Penyajian data

Dalam konteks artikel "Digitalisasi Tata Kelola SDM Aparatur di Indonesia," penggunaan teknologi untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES: Rosari et al. (2022) menekankan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan SDM, khususnya dalam konteks keuangan BUMDES, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Teknologi seperti aplikasi manajemen SDM dapat mempermudah proses pengumpulan data, penyusunan laporan, dan pemantauan kinerja SDM secara real-time. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan lebih efektif dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya yang ada. Digitalisasi juga membantu mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data yang lebih akurat dan terstruktur.
2. Pentingnya Pengetahuan Digital bagi SDM Aparatur: Maslikhah (2023) mengungkapkan bahwa pengembangan kompetensi digital bagi SDM aparatur pemerintah sangat penting untuk menghadapi era digital. Penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan desa, seperti yang dijelaskan dalam penelitian tersebut, mengharuskan aparatur desa untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan digital yang memadai. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan administrasi serta komunikasi antar instansi pemerintah. Peningkatan kapasitas digital bagi aparatur desa memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
3. Analisis Penerapan Digitalisasi dalam Pengelolaan Naskah dan Arsip Aparatur Sipil Negara: Saggaf (2020) menyoroti penerapan sistem digitalisasi arsip (DOA) yang digunakan dalam pengelolaan naskah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone. Sistem ini memungkinkan pengelolaan arsip secara elektronik, yang mempercepat proses pencarian, penyimpanan, dan pengarsipan dokumen penting terkait SDM. Hal ini juga mendukung pencapaian tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan berbasis teknologi. Penerapan digitalisasi dalam pengelolaan administrasi ini menunjukkan pentingnya adopsi teknologi untuk mendukung kelancaran proses administrasi pemerintahan dan meningkatkan layanan publik.

Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Kompetensi Digital untuk Meningkatkan Kinerja SDM Aparatur

Pengembangan kompetensi digital bagi SDM Aparatur di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menghadapi tantangan di era digital. SDM Aparatur yang kompeten dalam teknologi digital akan lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi dan melayani masyarakat. Dalam konteks ini, kompetensi digital melibatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi, sistem digital, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip keamanan dan etika digital. Pengembangan kompetensi ini tidak hanya sebatas pelatihan teknis, tetapi juga mencakup pembekalan tentang cara teknologi dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan dalam melayani publik secara lebih efisien dan transparan (Amalia et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap aparatur negara memperoleh pelatihan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi digital adalah melalui program pelatihan dan pendidikan berbasis teknologi. Program pelatihan ini harus menekankan pada penguasaan perangkat lunak dan aplikasi yang sering digunakan dalam pekerjaan pemerintahan, seperti sistem informasi manajemen, e-government, dan alat analisis data (Saggaf, 2020). Dengan meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam menggunakan perangkat digital, diharapkan mereka dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, pelatihan juga harus mencakup aspek etika penggunaan teknologi agar SDM Aparatur dapat memahami implikasi sosial dan etis dari penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Penting juga untuk memperhatikan aspek kultural dalam pengembangan kompetensi digital. Penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan harus didorong oleh perubahan budaya kerja di kalangan ASN. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya melibatkan pengembangan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan sikap para aparturnya. Salah satu tantangan utama adalah mengubah kebiasaan lama yang masih bergantung pada proses manual dan berbasis kertas ke sistem digital yang lebih efisien dan cepat. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi digital juga harus memperhatikan aspek perubahan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan inovasi (Irawaty et al., 2023). Selain itu, kompetensi digital juga berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan strategis pemerintah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif. SDM Aparatur yang terampil dalam teknologi digital dapat mengakses data dan informasi lebih cepat, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan berbasis data. Hal ini akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang lebih baik, terutama dalam sektor-sektor yang

membutuhkan respons cepat, seperti layanan kesehatan dan administrasi kependudukan (Rizal et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan pemerintahan yang lebih luas.

Dalam implementasinya, pengembangan kompetensi digital untuk SDM Aparatur juga memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, lembaga pendidikan, serta sektor swasta. Pemerintah harus menggandeng penyedia teknologi dan lembaga pelatihan untuk menyusun modul pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pelatihan tersebut tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui platform pembelajaran daring yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh seluruh ASN di berbagai daerah (Rohmadi & Idrus, 2023). Dengan cara ini, diharapkan pelatihan dapat dijangkau oleh lebih banyak aparturnya, bahkan yang berada di daerah terpencil sekalipun.

Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan kompetensi digital juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelatihan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kinerja SDM Aparatur. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi pada kemampuan teknis dan sikap kerja aparturnya setelah mengikuti pelatihan. Selain itu, evaluasi juga harus mencakup penilaian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan setelah adanya peningkatan kompetensi digital di kalangan ASN (Junianto & Busiri, 2023). Jika program pelatihan terbukti efektif, maka program tersebut dapat dijadikan model untuk pengembangan kompetensi digital di seluruh sektor pemerintahan.

Pengembangan kompetensi digital di kalangan SDM Aparatur merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien. Selain itu, hal ini juga akan mendukung tercapainya visi pemerintah dalam membangun Indonesia menuju era digital yang lebih maju. Dengan penguasaan teknologi yang baik, SDM Aparatur akan lebih mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan kualitas yang lebih tinggi, serta dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi digital harus menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik di Indonesia (Langga & Hyron, 2024).

Upaya Peningkatan Teknologi dalam Lingkungan SDM Aparatur

Peningkatan teknologi dalam lingkungan SDM aparatur di Indonesia merupakan salah satu langkah penting untuk menghadapi tantangan digitalisasi yang semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, instansi pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan digitalisasi dalam manajemen aparatur untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Salah satu bentuknya adalah transformasi digital dalam manajemen SDM aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Upaya ini termasuk pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempercepat proses kerja dan mempermudah akses informasi bagi aparatur. Hal ini semakin relevan mengingat pentingnya literasi digital dan peningkatan kompetensi SDM aparatur untuk mendukung kelancaran operasional di berbagai sektor pemerintahan (Rosari et al., 2022). Salah satu contoh yang menarik adalah upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) dalam mengembangkan berbagai aplikasi TIK, seperti e-Kinerja, e-Karir, dan e-Pelatihan untuk memudahkan pengelolaan data SDM aparatur. Teknologi ini memungkinkan manajer untuk melakukan pemantauan kinerja secara real-time, serta memberikan kemudahan dalam merencanakan pelatihan dan pengembangan karir bagi aparatur. Namun, meskipun ada perkembangan signifikan dalam penggunaan teknologi, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM aparatur dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Dalam hal ini, upaya pelatihan dan penyuluhan kepada aparatur mengenai pentingnya teknologi informasi menjadi langkah yang sangat diperlukan (Maslikhah, 2023).

Pentingnya peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi diakui oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam memanfaatkan aplikasi e-Kinerja untuk menilai kinerja PNS. Melalui e-Kinerja, setiap pegawai dapat merekam pekerjaan harian yang terintegrasi dengan sistem, sehingga memudahkan pengukuran kinerja dan evaluasi prestasi kerja. Implementasi sistem ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat di antara aparatur, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong inovasi dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak hanya sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan daya saing aparatur (Firdaus et al., 2021).

Sementara itu, upaya pengembangan teknologi dalam lingkungan SDM aparatur tidak hanya terfokus pada penggunaan aplikasi dan perangkat digital, tetapi juga pada penataan dan penyederhanaan struktur proses bisnis. Kementerian PANRB mencatat pentingnya integrasi sistem aplikasi pemerintahan untuk mendukung percepatan transformasi digital di sektor birokrasi. Ini termasuk penyelesaian regulasi, pembangunan infrastruktur digital, serta peningkatan kapasitas ASN dalam literasi digital. Pemerintah juga menggandeng lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan lembaga internasional untuk memastikan penerapan teknologi yang aman dan efektif dalam

pengelolaan SDM aparatur. Dengan demikian, kebijakan digitalisasi ini harus diterapkan secara menyeluruh, dari regulasi hingga peningkatan kompetensi individu aparatur (Irawaty et al., 2023). Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam implementasi teknologi di sektor SDM aparatur masih ada. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kompetensi SDM dalam bidang teknologi, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, serta potensi kerusakan sistem yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap aplikasi yang digunakan serta memastikan bahwa seluruh aparatur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Pengembangan kompetensi SDM aparatur dalam bidang teknologi informasi menjadi kunci untuk mempercepat proses transformasi digital dan mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien (Rizal et al., 2022).

Peran Digitalisasi dalam Mendorong Reformasi Birokrasi di Indonesia

Digitalisasi telah menjadi faktor kunci dalam mendorong reformasi birokrasi di Indonesia, terutama dalam hal tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara. Sebagai salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk mengelola data pegawai dengan lebih sistematis dan akurat. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan administrasi SDM aparatur sangat vital dalam upaya mendigitalisasi seluruh proses birokrasi. (Rosari et al., 2022) Digitalisasi yang diterapkan dalam proses rekrutmen, pengembangan karir, serta pengelolaan gaji dan tunjangan aparatur, memberikan kemudahan yang luar biasa dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai. Sebagai contoh, aplikasi berbasis web yang menyajikan data SDM secara real-time menjadi alat yang penting dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Maslikhah, 2023). Selain itu, digitalisasi juga mendorong penguatan sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengelola data kepegawaian secara lebih efektif. Sistem ini mendukung keterbukaan data yang dapat diakses oleh publik, sehingga menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan SDM aparatur. Langkah ini sangat mendukung upaya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pegawai negara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia. (Irawaty et al., 2023) Digitalisasi juga memungkinkan adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur dengan menggunakan platform online, yang dapat menjangkau lebih banyak peserta di berbagai daerah, bahkan daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerataan kualitas SDM aparatur dapat dicapai lebih cepat melalui berbagai pelatihan berbasis digital. (Firdaus et al., 2021).

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan SDM aparatur juga mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih profesional dan terstruktur. Adanya sistem yang

terintegrasi dan transparan membuat proses birokrasi menjadi lebih efisien. Digitalisasi memudahkan aparat pemerintah dalam melakukan pekerjaan administrasi dan pelayanan publik tanpa harus menghabiskan waktu yang berlebihan untuk kegiatan manual. Sebagai contoh, sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis digital memungkinkan otoritas untuk memantau kinerja dan aktivitas pegawai secara lebih tepat dan akurat. (Amalia et al., 2024) Selain itu, digitalisasi ini juga berdampak pada perubahan pola kerja yang lebih terbuka dan komunikatif antar berbagai pihak dalam birokrasi. Hal ini akan mengurangi potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan aparaturnegara. (Rizal et al., 2022). Namun demikian, pelaksanaan digitalisasi ini juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah masalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Tidak semua aparaturnemiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan pembinaan dan pelatihan agar SDM aparaturnedapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. (Rohmadi & Idrus, 2023) Di samping itu, diperlukan pula peningkatan infrastruktur digital di berbagai daerah untuk mendukung kelancaran proses digitalisasi ini. Penyediaan jaringan internet yang stabil dan perangkat yang memadai akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi digitalisasi dalam birokrasi. (Junianto & Busiri, 2023).

Digitalisasi juga berperan penting dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dalam birokrasi. Dengan adanya data yang terintegrasi dan mudah diakses, pimpinan di berbagai tingkatan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kecepatan dalam pengambilan keputusan ini tentu sangat penting, terutama dalam menghadapi permasalahan yang muncul secara mendesak. (Langga & Hyron, 2024) Oleh karena itu, digitalisasi berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efektif, yang pada gilirannya dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang lebih modern dan responsif terhadap perubahan zaman. (Anwar & Rohman, 2020).

Kesimpulan

Pengembangan kompetensi digital di kalangan SDM Aparatur sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Penerapan teknologi di birokrasi dapat mempercepat dan mempermudah proses administrasi, serta meningkatkan akurasi dalam pelaksanaan tugas, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan respons cepat, seperti administrasi kependudukan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik harus terus didorong untuk meningkatkan kualitasnya. Selain itu, program pelatihan berbasis teknologi digital yang mengutamakan

pengembangan keterampilan teknis dan pemahaman etika penggunaan teknologi perlu diperkenalkan. SDM Aparatur yang memiliki kompetensi digital yang memadai akan lebih siap dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor untuk memastikan penerapan teknologi yang optimal.

Penerapan digitalisasi dalam manajemen SDM Aparatur juga sangat penting, terutama dalam hal pemantauan kinerja. Penggunaan aplikasi TIK untuk memantau dan mengelola kinerja aparatur dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam birokrasi. Dengan demikian, melalui pengembangan kompetensi digital dan penerapan teknologi yang tepat, diharapkan birokrasi Indonesia dapat lebih efisien, profesional, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat digitalisasi tata kelola SDM aparatur di Indonesia, sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Penting untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan TIK yang merata bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dapat bekerja sama dengan instansi yang bergerak di bidang teknologi informasi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk menyelenggarakan pelatihan teknis terkait teknologi informasi. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mengenai e-government, aplikasi berbasis digital, sistem pemrograman, serta administrasi berbasis digital. Dengan demikian, ASN akan lebih siap dalam mengelola dan menerapkan teknologi dalam pelayanan publik, meningkatkan kualitas kinerja, dan mendukung sistem pemerintahan yang lebih efisien.

b. Peningkatan Infrastruktur Digital di Seluruh Wilayah Indonesia

Pemerintah harus terus meningkatkan dan memperluas akses internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan internet, seperti pembangunan jaringan 4G dan 5G di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang telekomunikasi dan peningkatan literasi digital menjadi langkah penting untuk memastikan akses informasi yang merata di seluruh daerah. Dengan adanya jaringan yang lebih luas dan stabil, diharapkan proses digitalisasi di birokrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

c. Penghargaan dan Fasilitas untuk ASN yang Berprestasi dalam Teknologi

Penghargaan bagi ASN yang memiliki kemampuan TIK yang baik, baik secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan, harus diberikan. ASN yang berinovasi dalam penerapan teknologi harus dihargai atas kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain penghargaan, hasil inovasi teknologi yang diterapkan harus berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemberian reward ini dapat berupa fasilitas pengembangan karier atau insentif lainnya yang mendorong ASN untuk terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam bidang teknologi, serta memberikan motivasi bagi ASN lain untuk mengembangkan kompetensi mereka.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, digitalisasi tata kelola SDM aparatur di Indonesia dapat berjalan dengan baik, mempercepat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik.

Referensi

- Amalia, D., Ghani, R., Devina, A., Abdillah, V. J., Suryani, Y., Tarisa, T., ... & Munawaroh, F. M. M. (2024). Seminar E-Government dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Unggul dan Peduli Digitalisasi di Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Jawa Barat. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 5(1), 100-109.
- Anwar, A. Z., & Rohman, F. (2020). Digitalisasi Dokumen dan Pelayanan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa. *Abdimas Unwahas*, 5(1).
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226-239.
- Irawaty, T., Wulandari, W., Rohayatin, T., & Fujilestar, N. A. (2023). Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam penerapan e-government di Desa Wantilan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 7(1), 181-190.
- Junianto, I. D., & Busiri, B. (2023). Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Langga, L., & Hyron, H. S. (2024). Pendampingan Digitalisasi BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Desa Hangalande, Kabupaten Ende. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 8-15.
- Maslikhah, L. (2023). Digitalisasi Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Sugihwaras. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(3), 102-113.

- Rizal, A. F. R. I. Z. A. L., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76-91.
- Rohmadi, D. P. H., & Idrus, I. A. (2023). Kapasitas Birokrasi Dalam Menggunakan Aplikasi Berbasis Digitalisasi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Pemerintahan Daerah. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 5(1), 40-47.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040-3049.
- Saggaf, S. (2020). Analisis Penerapan Digitalisasi Online Arsip (DOA) Pegawai pada Pengelolaan Tata Naskah Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 1(1), 47-54.
- Soendari, T. (2012). *Metode penelitian deskriptif*. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17, 75.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.